

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
USULAN RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen	: Pengembangan Tata Kelola dan Transparansi Satu Data Tematik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	: Sekretariat Satu Data Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik
Kementerian/Lembaga Terkait	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Riau
Bappenas	:
CSO Mitra	: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan AURIGA, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink)
Point of Contact Kementerian/Lembaga	:

Sasaran Keberhasilan <i>(Dapat diisi sesuai dengan "Output yang diharapkan" yang terdapat dalam</i>	Penanggung Jawab <i>(Diisi dengan K/L atau OMS terkait)</i>	Ukuran Keberhasilan <i>(Merupakan tujuan akhir yang perlu dilakukan dalam mencapai output/Sasaran Keberhasilan)</i>	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung

<i>Milestone OGP)</i>							
1. Pengumpulan Bahan untuk Perencanaan Satu Data Tematik SDA-LH, termasuk Penyusunan Standar Data							
1. 1. Policy Brief OGI dan Satu Data Indonesia terkait Pemetaan Potensi dan Tantangan Pelaksanaan Satu	Satu Data Indonesia, Kementerian LHK Medialink, ICEL	Adanya diskusi terfokus dan diskusi publik yang difasilitasi oleh forum OGI dan Satu Data Indonesia untuk membahas progres Satu Data atas data terkait SDA- LH	Diskusi tentang keterbukaan dan Satu Data lingkungan hidup dan kehutanan, yang terdiri dari data lokasi (data terkait lingkungan, sosial, risiko kebencanaan), data				

Data sektor SDA-LH			riwayat kepatuhan, dan data sektor (misalnya: perkebunan, potensi, pendapatan negara dari sektor ini), data perhutanan sosial, data perizinan, pemberlakuan peta tematik satu peta .				
	<p>Satu Data Indonesia, Kementerian ESDM</p> <p>Medialink, PWYP Indonesia</p>		<p>Diskusi tentang keterbukaan dan Satu Data perizinan dan kontrak pengelolaan SDA khususnya sektor minerba, dan migas .</p>				

	<p>Satu Data Indonesia, Kementerian ATR/BPN</p> <p>Medialink, Auriga</p>		<p>Diskusi tentang pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terkait SDA-LH, termasuk akses dan pelibatan masyarakat.</p>				
<p>1.2. Kesepakatan antara instansi pusat dan daerah yang terkait dengan pengelolaan SDA-LH terkait (a) kewenangan dan (b) <i>business process</i> tata kelola data SDA-LH</p>	<p>Satu Data Indonesia, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR BPN, Pemerintah Provinsi Riau beserta OPD terkait</p> <p>Medialink, ICEL, PWYP Indonesia, Auriga</p>	<p>Adanya Forum Satu Data antara Satu Data Indonesia, dengan instansi pusat dan daerah yang berwenang atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta agraria dan tata ruang untuk menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewenangan tata kelola data SDA-LH; 2. <i>business process</i> tata kelola data SDA-LH. 	<p>Serial diskusi pembentukan Satu Data Tematik SDA-LH dalam Forum Satu Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Satu Data LHK 2. Forum Satu Data ESDM 3. Forum Satu Data Tata Ruang 4. Seluruh Forum Satu Data SDA-LH 				

1.3.a. Standar Operasional dan Prosedur Satu Data Tematik SDA-LH	<p>Satu Data Indonesia, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR BPN, Pemerintah Provinsi Riau beserta OPD terkait</p> <p>Medialink, ICEL, PWYP Indonesia, Auriga</p>	<p>Disempurnakan nya standar, prosedur penyediaan data, penerimaan data, dan pertukaran data antara Pemerintah Pusat dengan walidata, termasuk adanya peta jenis data pada masing-masing instansi yang dapat diakses oleh dan disusun berdasarkan pelibatan partisipasi masyarakat</p>		<p>Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Satu Data Tematik SDA-LH</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.3.b. Peta Jenis Data SDA-LH pada masing-masing instansi	<p>Satu Data Indonesia, KLHK</p> <p>Medialink, ICEL</p>			<p>Penyusunan Peta Jenis Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan: data lingkungan hidup dan kehutanan, yang terdiri dari data lokasi (data terkait lingkungan, sosial, risiko kebencanaan), data riwayat kepatuhan, dan data sektor (misalnya: perkebunan, potensi, pendapatan negara dari sektor ini), data perhutanan sosial, data perizinan, pemberlakuan peta tematik satu peta</p>				
---	---	--	--	---	--	--	--	--

<p>Data SDA-LH termasuk perizinan, kontrak, dan dokumen terkait tata ruang dapat diakses publik di portal data</p>	<p>Satu Data Indonesia, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR BPN, Pemerintah Provinsi Riau beserta OPD terkait</p> <p>Medialink, ICEL, PWYP Indonesia, Auriga</p>	<p>Dokumen/data dan informasi penataan ruang untuk perlindungan SDA dan lingkungan berkelanjutan, izin dan kontrak SDA dipublikasi dalam portal Satu Data Tematik SDA-LH sesuai standar Satu Data Indonesia yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.</p>					<p>Data SDA-LH termasuk perizinan, kontrak, dan dokumen terkait tata ruang dapat diakses publik di portal data</p>
--	--	---	--	--	--	--	--